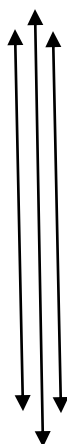




**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RANWAL)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025**



**BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BATANG
JL. VETERAN NO.10 BATANG 51215
TELP (0285) 392344**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Dengan adanya Renja ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governmence*).

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja tersebut memuat prioritas kegiatan pembangunan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan Renja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Batang, Maret 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BATANG

Dr.AGUNG WISNU BARATA, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710404 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD	28
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN	

LAMPIRAN :

- 1 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025 (RANWAL)
- 2 TABEL T-C 29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN KESBANGPOL DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
- 3 TABEL T-C 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH BADAN KESBANGPOL KAB.BATANG
- 4 TABEL T-C 31 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN
2025
- 5 TABEL T-C 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2026 KAB.BATANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD. Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Batang dipimpin oleh Penjabat Bupati Batang sejak bulan Mei 2023, dimana sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan telah ditetapkan dalam PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 yaitu bagi daerah yang tidak

memiliki kepala daerah karena masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan khususnya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) periode 2023-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan tahun ketiga penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

Tujuan :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel
- 2) Meningkatnya Ketahanan Daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang kondusif

Sasaran :

- 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 2) Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja (pasal 125) , meliputi :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD (Pasal 126-130), meliputi :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD (Pasal 131-135) :
 - a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
 - b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan 5 dalam forum PD/lintas PD
 - c. Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Pasal 136-137) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Pasal 138) Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah (Pasal 139-143)
 - a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
 - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
 - c. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - d. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
 - e. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan tata cara penyusunan Renja di atas , dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 yang disusun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Sesuai dengan tujuan dan strategi 4 tahun kedepan 2023-2026, maka arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Sbb.:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara ketatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang kredibel, profesional dan dinamis, mengedepankan prinsip good governance.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan Politik yang Demokratis
3. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai nilai luhur budaya bangsa, Pancasila, Wawasan Kebangsaan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat/Lembaga masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional
5. Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial.

Dokumen Renja menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dalam menganggarkan program dan kegiatan serta keterkaitannya dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan pokok pokok program sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Adapun perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2025 memuat tentang pengelolaan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyajian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, pembahasan forum OPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 7 Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 9 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Batang **Nomor 36 Tahun 2023** tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang di tahun 2025 serta

mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yaitu memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk Tahun 2025 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2025 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Kabupaten Batang Tahun 2025.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Batang.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Batang Tahun 2025.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan capaian Renstra OPD Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah;

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2023 dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan Isu-isu Penting dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bagian ini menguraikan proses usulan kegiatan masyarakat yang diakomodir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Batang

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kesbangpol.

3.3 Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : TIDAK ADA
- 2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan** Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (100%)

- **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tercapai 100% dikarenakan Tahun 2023 Sekretaris, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pensiun dan 1 orang staf (Administrasi Umum) mutasi ke DP3AP2KB (95,42%)
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (100 %)

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)
- **Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (100%)
- **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100%)
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (100 %)
 - Penyediaan peralatan rumah tangga (100%)
 - Penyediaan bahan logistik kantor (100%)
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (100%)
 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100%)
 - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (100%)
- **Kegiatan** Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)
 - pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)
 - **Kegiatan** penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan**
 - Penyediaan jasa surat menyurat (100%)
 - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (100%)
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (100%)
- **Kegiatan** Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (100%)

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- **Kegiatan** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan target 16 kali kegiatan realisasi sebanyak 21 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- **Kegiatan** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah target 24 kali kegiatan realisasi sebanyak 24 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di daerah target 3 kali kegiatan realisasi sebanyak 3 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah target 3 kali kegiatan realisasi sebanyak 3 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- d. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan
- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah target 4 kali kegiatan realisasi sebanyak 4 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- e. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan
- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah target 4 kali kegiatan realisasi sebanyak 4 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- f. **Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan
- ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 7

kali kegiatan realisasi sebanyak 7 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%.

- ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 23 kali kegiatan realisasi sebanyak 23 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota target 37 kali kegiatan realisasi sebanyak 37 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut diantaranya adalah adanya alokasi dana, adanya SDM yang potensial dengan dukungan operasional kegiatan yang cukup memadai.

Implikasinya terhadap target capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah dengan tercapainya target program/kegiatan tahun 2023 yang merupakan tahun pertama Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, juga memungkinkan tercapainya target akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C 29 (Lampiran)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2023 dapat diketahui dari sasaran-sasaran dibawah ini :

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol, Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib, terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik tercermin dari rata-rata capaian sasaran 100%.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa

hal yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan.
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Politik Masyarakat
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
4. Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Terbentuknya Tim Pengawasan Lembaga asing dan Orang asing yang melibatkan jajaran OPD, Kejaksaan, Polres, Kodim dan keimigrasian.
6. Terbentuknya Tim penyelenggara keamanan dalam negeri/ Penanganan konflik sosial
7. Terbentuknya tim FKUB, FORKOPIMDA

Selanjutnya dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dengan 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Badan Kesbangpol, persentase demo tertangani, prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang perihal Target Renstra PD dan Realisasi capaian dapat dijelaskan sbb :

1. Nilai SAKIP Badan Kesbangpol untuk Tahun 2023 sesuai pemutahiran data hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Batang mendapat nilai 76,55 dari Target 71.

Keterangan :

- ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
- ✓ Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
- ✓ Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
- ✓ Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

- ✓ Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagian dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jumlah rekomendasi/saran :

- ✓ Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal telah ditindak lanjuti
 - ✓ Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Persentase demo tertangani Tahun 2023 sebanyak 31 (kasus PLTU penyesuaian harga tanah) dan audiensi sebanyak 11
 3. Prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi untuk Tahun 2023 Tidak ada.

Peningkatan kualitas pencapaian kinerja tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesbangpol meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal , diklat, bimtek, sosialisasi dan kegiatan lainnya dibidang urusan ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Terjalinnya mitra kerja sama Tim Terpadu PORA, FORKOPIMDA yang harmonis dibidang kamtrantibmas .
3. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* (*FKUB*, *FKDM*,) di bidang Kesatuan Bangsa , Kerukunan umat beragama dan kewaspadaan dini terhadap ATGH yang berasal dari radikal kanan / kiri dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*; dan *Forkopimda*.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C 30 (Lampiran)

2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesbangpol merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Batang yang diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya , fasilitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya , fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran "Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran dengan tingkat capaian sebesar 100% yang artinya sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol tahun 2023 Kabupaten Batang telah mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Sasaran "Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100% yang artinya sasaran Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3) Sasaran "Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100%, yang artinya sasaran Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Secara umum Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Batang khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan baik, Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.

Keberhasilan Program pembinaan terhadap Ormas/LSM dan Pembinaan Politik salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu/pemilukada dan terselenggaranya dengan aman, lancar dan tanpa diikuti konflik. Badan Kesbangpol Kabupaten Batang senantiasa melakukan pemantauan dan monitoring bersama sama dengan Tim DESK Pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu baik skala lokal maupun nasional. Selama kurun waktu lima tahun, semua pemilu yang diselenggarakan berlangsung dalam suasana kondusif, sinergitas dan koordinasi yang baik selama ini terjalin sangat harmonis antara penyelenggara pemilu dan pemerintah Kabupaten Batang.

Berdasarkan realita kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dapat diuraikan beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai permasalahan yang bisa menghambat kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol pada waktu mendatang 2023-2026 antara lain :

1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama :
 - a. Masih adanya upaya dari kelompok/Golongan yang mempertentangkan Pancasila;
 - b. Menurunnya pemahaman dan implementasi nilai nilai Pancasila, Demokrasi, Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air akibat pengaruh globalisasi;
 - c. Sekelompok masyarakat mulai berpikir, beraksi dan berupaya menggantikan dengan sistem pemerintahan khilafah berdasarkan ajaran islam;
 - d. Dampak krisis keuangan global cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat menghambat laju pertumbuhan pembangunan daerah, daya beli masyarakat maupun terjalinnya kesenjangan sosial masyarakat. Kondisi

tersebut dapat menimbulkan potensi konflik horizontal dan konflik konflik lainnya.;

- e. Bertambahnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK dari perusahaan yang mengalami kepailitan;
- f. Pergeseran sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang selama ini berjalan dianggap mampu menghadapi ekonomi global ketimbang sistim ekonomi Pancasila.
- g. Pengaruh media massa elektronik dan cetak dalam pengertian memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat;
- h. Budaya daerah dan kearifan lokal dipandang belum mampu menjadi filter dalam menghadapi pengaruh krisis global bagi bangsa;
- i. Kecenderungan melunturnya apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa Indonesia;
- j. Kecenderungan menurunnya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- k. Masih banyaknya pengguna miras, narkoba yang merugikan masyarakat;
- l. Masih banyak perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang sering meresahkan masyarakat;
- m. Nilai nilai kepedulian sosial dan kegotongroyongan kian bergeser ke individualisme dan Egoisme.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :

- a. Perubahan penyempurnaan Undang undang bidang politik mewarnai dinamika kehidupan/aktifitas para elite politik yang berpotensi peningkatan suhu politik dan potensi kerawanan konflik interes internal/eksternal dalam kehidupan berpolitik;
- b. Pertumbuhan Partai politik mengalami peningkatan pada setiap penyelenggaraan pemilu, meskipun belum tentu lolos dalam verifikasi MENKUMHAM maupun verifikasi factual dari KPU sebagai peserta pemilu;.
- c. Kontroversi fenomena GOLPUT terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu yang muncul sebagai akibat sikap apatis dan krisis kepercayaan atas tidak terpenuhinya aspirasi;

- d. Fasilitas bagi Parpol, LSM, Ormas yang merupakan bagian dari Infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
 - f. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata dimasyarakat sehingga sering terjadi gesekan yang diakibatkan provokasi pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- a. Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok/Golongan masyarakat lainnya dalam menuntut berbagai keinginan;
 - b. Masih eksisnya gerakan/ancaman terorisme melalui aksi teror maupun gerakan kelompok radikal;
 - c. Lemahnya kondisi Kamtibmas yang berpotensi timbulnya konflik antar kelompok, kasus kriminalitas, diskriminasi dan kondisi Kamtibmas yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kurun waktu empat tahun kedepan perlu mengetahui seperti apa dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Analisis terhadap lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

1) Kekuatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- a) Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat
- b) Situasi kerja yang harmonis

- c) Hubungan dengan stakeholder, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang relatif baik
- d) Jaringan Informasi dan komunikasi yang memadai

2) Kelemahan

Disamping kekuatan tersebut, terdapat berbagai kelemahan internal yang harus diminimalisir serendah mungkin, antara lain:

- a) Kuantitas dan kualitas SDM belum sesuai dengan beban kerja
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi dan belum mampu mendukung operasional pelaksanaan tupoksi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Mengantisipasi peningkatan aksi kriminalitas yang disebabkan banyaknya pengangguran;
- b) Meningkatkan kemampuan maupun ketersediaan teknologi untuk menyongsong fase “New Normal”;
- c) Menyusun inovasi pelayanan, yaitu menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah;
- d) Makin meningkatnya orang asing yang bekerja dan berdomisili di wilayah Kabupaten Batang yang memerlukan pengawasan intensif.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kabupaten Batang;
- c) Jalinan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan maupun kelurahan serta tokoh pemuda ;
- d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah

masing-masing, meng-counter informasi *hoax* yang beredar di masyarakat.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2025 :

a) Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya penurunan angka kriminalitas perlu lebih mendapatkan perhatian;
2. Inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah;

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang di tahun 2025 dapat disampaikan sbb :

1. Untuk mengantisipasi peningkatan aksi kriminalitas di Kabupaten Batang yang berpotensi meningkat, maka pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi ke semua wilayah kecamatan guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah masing-masing. Sosialisasi tentunya diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan ataupun sosialisasi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Upaya mengantisipasi aksi kriminalitas perlu melibatkan instansi vertikal di daerah. Oleh karena itu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Batang perlu diaktifkan kembali di tahun 2024.
3. Dalam mensosialisasikan perlu mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum yang bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM), serta melibatkan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Kabupaten Batang.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 antara lain :

- 1) Mekanisme koordinasi yang tepat dalam rangka mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang optimal serta evaluasi capaian program dan kegiatan secara berkala.
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan sehingga mampu menjawab permasalahan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Cakupan tugas dan fungsi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani, belum didukung dengan jumlah dan kompetensi SDM yang optimal di masing-masing bidang, sehingga memerlukan strategi khusus agar pelaksanaan tupoksi dapat terselenggara dengan baik serta perlu didukung keberadaan fasilitas dan anggaran yang dikelola dengan baik.
- 5) Kebutuhan terhadap kajian/penelitian terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan masih cukup tinggi, serta perlunya peningkatan inovasi daerah dalam rangka penguatan daya saing daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran Kabupaten Batang tahun 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dijelaskan sbb.

1. Berdasarkan Matrik RKPD Final Tahun Perencanaan 2024 kebutuhan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.173.327.981,-
2. Program kerja yang direncanakan tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan
 - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
 - c. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
 - d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
 - e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
 - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
3. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pagu dan Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.9.587.107.813,- Penyebab perbedaan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan pagu anggaran yang ditetapkan adalah menyesuaikan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah berdasarkan prioritas program/kegiatan.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC-31 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 (LAMPRAN)

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

kegiatan masyarakat yang diusulkan lewat forum diskusi, musrenbang Kecamatan/Kabupaten Batang maupun usulan langsung dari masyarakat, Badan Kesbangpol tidak mengakomodir usulan yang berkaitan dengan tupoksi Kesbangpol. Sebagaimana tabel 2.5 (TC-32) tentang usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024.

Tabel 2.5 (TC-32)

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	catatan
			N I H I L		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 secara khusus amanat pembangunan tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007 secara khusus amanat pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 secara khusus amanat pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan Daerah :

1. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

Sasaran Daerah :

1. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Asisten

Pemerintahan dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang :

- 1. Terciptanya suasana aman, nyaman, tentram serta kokohnya persatuan, kesatuan bangsa dan karakter bangsa
- 2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah

B. SASARAN

Untuk mendukung tujuan diatas, sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang adalah :

- 1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol.
- 2. Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpelihanya suasana aman, nyaman dan tertib.
- 3. Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kesbangpol Kabupaten Batang

No	Tujuan RPD Tahun 2023- 2026	Sasaran RPD Tahun 2023-2026	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya pelayanan prima bagi masy	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbang pol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Formulasi : Nilai Sakip Badan Kesbangpol hasil evaluasi Tim Evaluator	71 (skor)	71,5 (skor)	72 (skor)	72,5 (skor)

					AKIP Kabupaten				
2	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Terciptanya suasana aman, nyaman, tentram serta kokohnya persatuan, kesatuan bangsa dan karakter bangsa	Menciptakan stabilitas politik di masy dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	Indikator Sasaran Persentase demo tertangani a) Persentase masy yg mengikuti Wasbang Formulasi : (jumlah masy yang telah mendapat sosialisasi wasbang yg mengamalkan ideologi & karakter bangsa yang bagus : jumlah masy yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) * 100	100	100	100	100
					b) Persentase Parpol & Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah Formulasi : (Jumlah Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung	100	100	100	100

					pemerintah : Jumlah parpol dan lembaga Pendidikan di Batang) *100				
				Terpelihara ranya rasa persatuan dan partisipasi masy dalam penyelesaian konflik	Prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi Formulasi : (jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) *100	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2025 yaitu :
 - ✓ Pencapaian tujuan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
 - ✓ Pencapaian Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Batang;
 - ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam memelihara kondusivitas wilayah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak **6 (enam) program** dengan **12 (Duabelas) kegiatan** dan **30 (dua puluh tujuh) sub kegiatan** yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program bidang, yaitu sebagai berikut:

 - a. **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 5) Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan : a). Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b). Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c). Pembentukan Paskibaraka
- d). Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila

c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan

e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

- c) Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kabupaten Batang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kabupaten Batang yang tergabung dalam FORKOPIMDA Kabupaten Batang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kabupaten Batang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh perempuan) serta generasi muda (pelajar maupun mahasiswa), dan tidak lupa para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kabupaten Batang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak **6 (enam) program** dengan **12 (dua belas) kegiatan** yang terdiri dari **32** (tiga puluh dua) sub kegiatan. Anggaran Biaya guna menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2025 diperkirakan mencapai **Rp.9.173.327.981,- (Sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)**. Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
Target Capaian Kinerja : 5 laporan
Kebutuhan Dana : Rp. 15.436.700,-
- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
Target Capaian Kinerja : 25 Orang/12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 2.623.099.341,-

Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
- Target Capaian : 1 laporan
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 3.020.000,-
- c. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
- Target Capaian : 12 dokumen
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 26.760.000,-
- d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
- Target Capaian : 1 Paket
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 3.229.500,-
- e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
- Target Capaian : 4 paket
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 24.998.000,-

- f. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
 Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)
 Target Capaian : 1 Paket
 Kinerja
 Kebutuhan Dana : Rp. 2.000.700,-
- g. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor
 Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)
 Target Capaian : 11 Paket
 Kinerja
 Kebutuhan Dana : Rp. 15.973.000,-
- h. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
 Target Capaian : 4 Paket
 Kinerja
 Kebutuhan Dana : Rp 20.000.000,-
- i. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)
 Target Capaian : 12 Dokumen
 Kinerja
 Kebutuhan Dana : Rp. 2.500.000,-
- j. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Indikator Kinerja : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)
- Target Capaian : 12 laporan
- Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 65.000.000,-
- k. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Target Capaian : 1 Unit Mobil
- Kinerja : 3 Unit Sepeda Motor
- Kebutuhan Dana : Rp. 480.339.000,-
- l. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
- Target Capaian : 7 Unit
- Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 56.137.180,-
- l. Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Indikator Kinerja : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
- Target Capaian : 2 Orang
- Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp.10.000.000,-
- m. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)
- Target Capaian : 1 laporan
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 2.000.000,-
- n. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
- Target Capaian : 12 laporan
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 25.000.000,-
- o. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
- Target Capaian : 12 laporan
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 97.185.360,-
- p. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
- Target Capaian : 10 Unit
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 208.836.000,-

- q. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)
- Target Capaian : 1 Unit
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 55.000.000,-
- r. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)
- Target Capaian : 10 unit
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 7.500.000,-
- s. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)
- Target Capaian : 7 unit
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 6.000.000,-

2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)
- Target Capaian Kinerja : 1.050 Orang
- Kebutuhan Dana : Rp. 360.705.600,-
- b. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)
- Target Capaian Kinerja : 30 Orang
- Kebutuhan Dana : Rp. 6.000.000
- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan yng dilaksanakan untuk Pembentukan Paskibraka
- Indikator Kinerja : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)
- Target Capaian Kinerja : 100 Orang

Kebutuhan Dana : Rp. 760.000.000,-

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

a. **Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta pemantauan situasi politik di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

Target Capaian : 1.200 Orang
Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 332.928.500,-

Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

Target Capaian : 93 orang
Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 1.077.726.650,-

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)

Target Capaian : 13 laporan
Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 505.962.450,-

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)

Target Capaian : 500 Orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 150.506.000,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya

a Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)

Target Capaian : 200 Orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 233.764.000,-

6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

a. **Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)
Target Capaian Kinerja	: 700 Orang
Kebutuhan Dana	: Rp. 200.000.000,-
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)
Target Capaian Kinerja	: 3.000 Orang
Kebutuhan Dana	: Rp. 600.000.000,-
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

Target Capaian : 12 dokumen
Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 670.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu **Tujuan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel” dan “ Meningkatkan ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang kondusif”** dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat”**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kesbangpol Kabupaten Batang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp.9.173.327.981,- yang terinci dalam 6 Program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Harapannya, Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan sejalan dengan arah implementasi program unggulan

Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretaris, Kepala Bidang, Sub.Bagian, Sub Bidang dan Pengadministrasi Umum Badan Kesbangpol Kabupaten Batang secara bersama sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaanya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Demikian semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2025 ini nantinya dapat memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025

Batang, Agustus 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BATANG

Dr.AGUNG WISNU BARATA S.Sos M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710404 199101 1 001

LAMPIRAN

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
80101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja internal yang terlayani								
80101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								
8010120106	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	20 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	50%
80101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun								
8010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	100 orang/bulan	21 orang	24 orang	19 orang	79,17%	22 orang	40 orang	41%
8010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010120203	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	50 %
80101205	Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti diklat								
8010120509	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Badan Kesbangpol)	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	8 orang	-	2 orang	2 orang	100%	2 orang	4 orang	50 %
80101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola								
8010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	50 %
8010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	16 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	50 %
8010120603	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	4 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	50 %
8010120604	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	44 paket	12 paket	11 paket	11 paket	100%	11 paket	22 paket	50 %
8010120605	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010120606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	50 %
8010120609	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50 %
80101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli								
8010120710	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	28 unit	0 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	50 %
8010120711	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	50 %
80101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi								
8010120801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	50 %
8010120802	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	25 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010120804	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50 %
80101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara								
8010120902	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 bulan	50 %
8010120909	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	5 unit	5 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	40 %
8010120910	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	10 unit	50 %
8010120911	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)	28 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	50 %
80102	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang								
80102201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	78 kegiatan	15 kegiatan	21 kegiatan	21kegiatan	100%	22 kegiatan	43 kegiatan	55 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010220103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	17.200 orang	6100 orang	4300 orang	4300 orang	100%	4300 orang	8600 orang	50 %
8010220104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300 orang	-	-	-	-	15 orang	15 orang	5 %
80103	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase Parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah								
80103201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan lembaga pendidikan	48 kegiatan	20 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	100 %	9 kegiatan	37 kegiatan	77 %
8010320203	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	3475 orang	1500 orang	2425 orang	2425 orang	100%	2400 orang	2400 orang	137 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010320104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	490 orang	190 orang	125 orang	125 orang	100%	136 orang	orang	53 %
8010320105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	6 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	66,67%
80104	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan								
80104201	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan untuk pemantapan bidang pemberdayaan dan ormas	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan	300%	1 kegiatan	7kegiatan	87,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2022 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8010420104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	433 orang	120 orang	118 orang	418 orang	354%	100 orang	518 orang	119%
80105	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi,sosial budaya								
8010520101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisasi yang dilaksanakan	16 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	3 kegiatan	7 kegiatan	77 %
8010520104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	800 orang	220 orang	200 orang	203 orang	101,5%	203 orang	406 orang	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
80106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial								
8010620101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	205 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	100%	50 kegiatan	100 kegiatan	48 %
8010620103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	2500 orang	100 orang	700 orang	700 orang	100%	400 orang	1100 orang	44 %
8010620104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	12.051 orang	2.119 orang	2.973 orang	2.674 orang	89,94%	1160 orang	3834 orang	32 %
8010620106	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	48 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	50 %

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Batang

[illegible]

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Persentase unit kerja internal yang terlayani	100 %	3.651.734.781	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang	Persentase unit kerja internal yang terlayani	100 %	3.657.639.781	
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	15.436.700	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	15.436.700	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	5 laporan	15.436.700	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	5 laporan	15.436.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	2.623.099.341	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	2.629.004.341	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25 Org/bln	2.593.319.341	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25 Org/bln	2.593.319.341	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	26.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	32.820.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	3.020.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	2.865.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti diklat	2 orang	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti diklat	2 orang	10.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Batang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Batang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	21 paket 12 Dokumen 12 Laporan	133.701.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	21 paket 12 Dokumen 12 Laporan	133.701.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	3.229.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	3.229.500	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket	24.998.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket	24.998.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Batang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 paket	2.000.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Batang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 paket	2.000.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11 paket	15.973.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11 paket	15.973.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12 laporan	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12 laporan	65.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah Gedung yang dibangun , jumlah sarpras Gedung yang dibeli	12 unit	536.476.180	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah Gedung yang dibangun , jumlah sarpras Gedung yang dibeli	12 unit	536.476.180	

	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Batang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	480.339.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Batang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	480.339.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 unit	56.137.180	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	56.137.180	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumah Sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	25 laporan	124.185.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumah Sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	25 laporan	124.185.360	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	97.185.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	97.185.360	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	100 %	208.836.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	100 %	208.836.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10 unit	140.336.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10 unit	140.336.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	55.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	55.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10 unit	7.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Batang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	9 unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Batang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	9 unit	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Batang	persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang	95%	1.750.705.600	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Batang	persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang	100 %	2.005.805.600	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan yng dilaksanakan untuk meningkatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.750.750.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan yng dilaksanakan untuk meningkatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.005.805.600	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1050 Orang	360.705.600	Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1050 Orang	360.805.600	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	630.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	885.000.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Batang	Jumlah Paskibraka	100 orang	760.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Batang	Jumlah Paskibraka	100	760.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Kabupaten Batang	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	100 %	1.916.617.600	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Kabupaten Batang	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	100 %	1.916.617.600	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Kabupaten Batang	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan lembaga pendidikan		1.916.617.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Kabupaten Batang	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan lembaga pendidikan		1.916.617.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1200 Orang	332.928.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1200 Orang	332.928.500	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	93 Orang	1.077.726.650	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	93 Orang	1.077.726.650	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	13 laporan	505.962.450	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	13 laporan	505.962.450	
--	---	------------------	--	------------	-------------	---	------------------	--	------------	-------------	--

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Batang	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 %	150.506.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Batang	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100	150.506.000	
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Batang	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan untuk pemantapan Bidang pemberdayaan dan Ormas		150.506.000	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Batang	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 kegiatan	150.506.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	500 orang	150.506.000	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	500 Orang	150.506.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kabupaten Batang	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	100 %	233.764.000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kabupaten Batang	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	100 %	233.764.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisasi yang dilaksanakan		233.764.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisasi yang dilaksanakan		233.764.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang	100 orang	233.764.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100 orang	233.764.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Batang	Persentase penurunan konflik sosial	100 %	1.470.000.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Batang	Persentase penurunan konflik sosial	100 %	1.470.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kewasadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.470.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Batang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kewasadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.470.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	700 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	700 orang	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	3000 Orang	600.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	3000 orang	600.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12 dokumen	670.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12 dokumen	670.000.000	

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko	Persentase unit kerja internal yang terlayani	Kabupaten Batang	100 %	3.657.639.781	APBD Kab. Batang	-	100 %	4.034.621.403
80101201	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Batang	5 dokumen	15.436.700	APBD Kab. Batang	-	5 dokumen	16.500.000
8010120106	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporam capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	Kabupaten Batang	5 Laporan	15.436.700	APBD Kab. Batang	-	5 Laporan	16.500.000
80101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	Kabupaten Batang	12 Laporan	2.629.004.341	APBD Kab. Batang	-	12 Laporan	2.895.859.275
8010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kabupaten Batang	25 Org/bln	2.593.319.341	APBD Kab. Batang	-	25 Org/bln	2.852.651.275

8010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kabupaten Batang	12 dokumen	32.820.000	APBD Kab. Batang	-	12 dokumen	40.656.000
8010120203	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kabupaten Batang	1 laporan	2.865.000	APBD Kab. Batang	-	1 laporan	2.552.000
80101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Kabupaten Batang	2 orang	10.000.000	APBD Kab. Batang	-	2 Orang	15.000.000
8010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kesbangpol))	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Kabupaten Batang	2 Orang	10.000.000	APBD Kab. Batang	-	2 Orang	15.000.000
80101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	Kabupaten Batang	21 paket 12 dokumen 12 laporan	133.701.200	APBD Kab. Batang	-	21 paket 12 dokumen 12 laporan	147.250.000
8010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Batang	1 paket	3.229.500	APBD Kab. Batang	-	1 paket	3.500.000
8010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Batang	4 paket	24.998.000	APBD Kab. Batang	-	4 paket	30.000.000

8010120603	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Batang	1 paket	2.000.700	APBD Kab. Batang	-	1 paket	2.500.000
8010120604	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Batang	11 Paket	15.973.000	APBD Kab. Batang	-	11 Paket	16.500.000
8010120605	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Batang	4 Paket	20.000.000	APBD Kab. Batang	-	4 Paket	22.000.000
8010120606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Kabupaten Batang	12 dokumen	2.500.000	APBD Kab. Batang	-	12 dokumen	2.750.000
8010120609	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Kabupaten Batang	12 laporan	65.000.000	APBD Kab. Batang	-	12 laporan	70.000.000
80101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli	Kabupaten Batang	12 Unit	536.476.180	APBD Kab. Batang	-	12 unit	610.000.000
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		4 unit	480.339.000			4 unit	550.000.000

8010120711	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kabupaten Batang	8 Unit	56.137.180	APBD Kab. Batang	-	8 unit	60.000.000
80101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kabupaten Batang	25 Laporan	124.185.380	APBD Kab. Batang	-	25 Laporan	130.512.128
8010120801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kabupaten Batang	1 laporan	2.000.000	APBD Kab. Batang	-	12 laporan	2.200.000
8010120802	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kabupaten Batang	12 laporan	25.000.000	APBD Kab. Batang	-	12 laporan	27.500.000
8010120804	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kabupaten Batang	12 laporan	97.185.360	APBD Kab. Batang	-	12 laporan	100.812.128
.80101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Kabupaten Batang	100 %	208.836.000	APBD Kab. Batang	-	100 %	219.500.000
8010120902	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kabupaten Batang	10 Unit	140.336.000	APBD Kab. Batang	-	10 Unit	145.000.000

8010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Batang	1 Unit	55.000.000	APBD Kab. Batang		1 Unit	60.000.000
8010120910	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kabupaten Batang	10 Unit	7.500.000	APBD Kab. Batang	-	10 unit	8.000.000
8010120911	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kabupaten Batang	9 unit	6.000.000	APBD Kab. Batang	-	9 unit	6.500.000
80102	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang	Kab. Batang	100 %	2.005.805.600	APBD Kab. Batang	-	100 %	1.648.511.910
80102201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan yng dilaksanakan untuk meningkatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Batang		2.005.805.600	APBD Kab. Batang	-		1.648.511.910
8010220103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	Kab. Batang	1050 Orang	360.805.600	APBD Kab. Batang	-	1050 orang	393.511.910
8010220104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Kab. Batang	30 Orang	885.000.000,-	APBD Kab. Batang	-	30 orang	650.000.000

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sejarah Kebangsaan (Orang)							
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Batang	100 Orang	760.000.000			100 orang	605.000.000
80103	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	Kab. Batang	100 %	1.916.617.600	APBD Kab. Batang	-	100 %	2.108.048.360
80103201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan lembaga pendidikan	Kab. Batang		1.916.617.600	APBD Kab. Batang	-		2.108.048.360
8010320203	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Kab. Batang	1200 Orang	332.928.500	APBD Kab. Batang	-	1200 orang	366.221.350

8010320104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Kab. Batang	93 Orang	1.077.726.650	APBD Kab. Batang		93 orang	1.185.268.315
8010320105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	Kab. Batang	13 Laporan	505.962.450	APBD Kab. Batang		13 laporan	556.558.695
80104	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Kab. batang	100 %	150.506.000	APBD Kab. Batang		100 %	165.556.600
80104201	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan untuk pemantapan Bidang pemberdayaan dan Ormas	Kab. Batang		150.506.000	APBD Kab. Batang			165.556.600

8010420104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	Kab. Batang	500 Orang	150.506.000	APBD Kab. Batang		500 orang	165.556.600
80105	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	Kab. Batang	100%	233.764.000	APBD Kab. Batang	-	100%	90.369.400
8010520101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Batang		233.764.000	APBD Kab. Batang	-		90.369.400
8010520103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Kab. Batang	100 orang	233.764.000	APBD Kab. Batang	-	-	90.369.400

80106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Kab. Batang	100 %	1.470.000.000	APBD Kab. Batang	-	100 %	1.540.000.000
8010620101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Batang		1.470.000.000	APBD Kab. Batang	-		1.540.000.000
8010620103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Kabupaten Batang	700 Orang	200.000.000	APBD Kab. Batang	-	700 Orang	220.000.000
8010620104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Kab. Batang	3000 Orang	600.000.000	APBD Kab. Batang	-	3000 Orang	650.000.000

8010620106	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Kab. Batang	12 dokumen	670.000.000	APBD Kab. Batang	-	12 dokumen	670.000.000
------------	---	---	-------------	------------	-------------	------------------	---	------------	-------------

